

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan Ke-13*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM pilihan metode & praktik penulisan artikel edisi revisi ke-4*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni Bandung, Bandung, Universitas Indonesia, 1998.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Bumi Aksara Jakarta, 1989.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2011.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sholehuddin M, *Sistem Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Sutrisno Hadi, *Metodolgi Research : Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi Cet.16*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.

B. Jurnal

Elly Sudarti, dan Sahuri Lasmadi, “Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap”, *Pandecta*, Vol. 16. No. 1 (2021) : 176.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/27516/11951>.

Guntur Rambey, 2016, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”, Vol. 1. No. 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Fontian Munzil, dkk, “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomi Negara dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22. No. 1 (2015).

Fuad Akbar Yamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.
<https://core.ac.uk/download/pdf/25492116.pdf>.

Indra Hafid Rahman, “PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”, *Varia Justicia*, Vol. 12. No. 1 (2016).
<https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/345>.

Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi, “Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19. No. 2 (2017): 8.

Michael Barama, “Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi”
http://repo.unsrat.ac.id/75/1/UANG_PENGGANTI_SEBAGAI_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_PERKARA_KORUPSI.pdf.

Muh.Adenriz Yunus, “Optimalisasi Eksekusi Pidana Uang Pengganti Melalui Pembentukan Satuan Kerja Khusus (Studi Kasus di Kejari Surakarta)”, *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum UNS*, Vol. 8. No. 3 (2019): 3.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47324>.

Riski Amelia, “Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti oleh Terpidana Kasus Korupsi di Kejari Palembang”.
https://repository.unsri.ac.id/63333/55/RAMA_74201_02011281823239_0024018303_0015049401_01_front_ref.pdf.

Siti Nur Chabibah, dkk, “DISPARITAS PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor:

20/PID.Sus.Anak/2020/PN-JMB Dan Putusan Nomor: 28/PID.Sus.Anak/2020/PN-JMB”. <https://repository.unja.ac.id/38952/>.

Sumarni Alam, “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5. No. 2 (2017): 160. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/924/588>.

Yuda Musatajab, “UANG PENGANTI SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”, *JURNAL RESTORATIVE JUSTICE*, Vol. 2. No 1 (2018): 14.

Yulia Monita, Rosmidah, Erwin, “Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar”, *Jurnal Karya Abdi*, Vol. 5. No. 3 (2021): 603. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/16649/12628/46194>.

C. Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/112001 tanggal 1 November 2001.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B- 012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

British Broadcasting Corporation (BBC), “Mengapa RUU Perampasan Aset penting di tengah terungkapnya kekayaan fantastis pegawai pemerintah?” Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7287vzd8zko>. Pada tanggal 08 Februari 2024, pada pukul 13.51 WIB.

WhistleBlowingSystem (WBS), “Korupsi” Diakses dari: <https://inspektorat.kebumenkab.go.id/wbs/index.php/publik/kategori/1>. Pada tanggal 11 September 2023, pada pukul 10.09 WIB.

N.n “*Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*” Diakses dari: <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null> Pada tanggal 11 September 2023, pada pukul 10.20 WIB.

E. Lainnya

Wawancara dengan Dian Susanty selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Jambi, Kamis, 23 November 2023, 09.38 WIB.

Wawancara dengan Irfan Rakhmadani merupakan Terpidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Senin, 08 Januari 2024, 14.37 WIB.

Wawancara dengan Soemarsono selaku Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Jambi, Senin, 27 November 2023, 11.00 WIB.

Wawancara dengan Teti Kurnia Ningsih selaku Kasubsi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Jambi, Rabu, 22 November 2023, 13.36 WIB.